

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



SRG Bisnis Strategis Logistik

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan Kemakmuran
Rakyat

**remarkable
Indonesia**

Koperasi Bakal Jadi
Pengelola Gudang
SRG
....7

Implementasi SRG
PT Pertani Gandeng
PT Tiga Pilar Sejahtera
....11

Pialang Ilegal Bisa
Diganjar 10 Tahun
Penjara
....16



Foto : Mendag, Gita Wirjawan, menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Bappebti, Nizarli, sebagai unit Kemendag terbaik untuk Wilayah Tertib Administrasi.

Di bulan Agustus 2012, ini, banyak berkah yang diterima bangsa Indonesia. Di saat umat muslim menjalankan ibadah ramadhan dan rayakan hari kemenangan Idul Fitri 1433 H, Indonesia juga peringatan hari kemerdekaan yang ke 67 tahun. Harapannya, semoga Indonesia semakin jaya dan rakyatnya makmur sentosa seperti cita-cita para pendiri dan pemimpin bangsa Indonesia.

Berkah yang melimpah juga sangat terasa di industri sistem resi gudang (SRG). Pada 29 Agustus 2012, PT Pos Indonesia (Persero) mengikrarkan memperluas bidang usaha di sektor SRG dan pasar fisik komoditi. PT Pos sebagai perusahaan logistik plat merah, sangat menyakini SRG dan pasar lelang komoditi menjadi ladang bisnis yang menjanjikan benefit. Karena itu, PT Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan Bappebti ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama.

Bagi PT Pos, ada banyak bidang layanan jasa yang bisa dikembangkan melalui SRG. Diantaranya, menjadi pengelola gudang, lembaga pembiayaan dan transaksi, pusat informasi harga dan tentunya jasa distribusi. Sedangkan di bidang pasar lelang komoditi, PT Pos melirik layanan jasa penyelenggara sistem pasar lelang. Sehingga masing-masing pasar lelang yang ada di sejumlah daerah saling terhubung dengan media digital. Dengan demikian, penyelenggaraan pasar lelang komoditi semakin efektif dan para pelaku pasar dapat menekan biaya transaksi. Dengan layanan jasa PT Pos tersebut, petani produsen pun memiliki posisi tawar tinggi sehingga mendapatkan harga yang menguntungkan.

Dua instrumen perdagangan modern itu bakal bisa dilayani PT Pos di seluruh nusantara. Hal itu didukung sarana dan in-

frastruktur yang dimiliki PT Pos melalui kantor cabang yang berjumlah sebanyak 2.800.

Di sisi lain, misi PT Pos tersebut didukung kebijakan pemerintah yang telah memasyarakatkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012. Sislognas adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor perdagangan di dalam negeri melalui distribusi jasa dan komoditi yang efisien dan efektif. Dengan Siglognas yang efisien dan efektif dalam bingkai NKRI, sektor perdagangan akan memiliki daya saing kuat terhadap gempuran produk-produk impor.

Pembaca budiman, laporan lain yang disuguhkan Redaksi pada edisi Agustus 2012, ini, yakni, diberinya peluang kepada kalangan koperasi sebagai pelaku usaha SRG. Harapannya, koperasi yang berbasis di sentra produksi komoditi tersebut dapat meningkatkan nilai tukar petani. Tentunya, selain laporan tadi, masih banyak informasi penting yang bisa dinikmati dan dicerna para pencinta media ini. Maka itu, silahkan mengikuti terus perkembangan industri perdagangan berjangka, SRG dan pasar lelang komoditi.

Akhir kata, izinkan Redaksi mengucapkan ;

**Selamat
Idul Fitri 1433 H.
Mohon Maaf
Lahir dan Batin.**

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

**KONTRAK
BERJANGKA**
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggu- Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanti, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke

E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- SRG Bisnis Strategis Logistik
- Koperasi Bakal Jadi Pengelola Gudang SRG

Pasar Lelang.....9-10

- Pasar Lelang On-Line
- Angkat Potensi Komoditi Bali

Resi Gudang.....11

- Implementasi SRG PT Pertani Gandeng PT Tiga Pilar Sejahtera

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Pialang Ilegal Bisa Diganjar 10 Tahun Penjara
- JFX Siap Luncurkan Kontrak Batubara
- Asosiasi Tunggal Industri PBK Segera Terbentuk
- Lembaga Dana Jaminan Perkuat SRG

Analisa.....18

Info Harga.....19

Wawasan.....22-23

- Yang Terlarang Bagi Perusahaan Pialang

Kolom.....24-25

- Mengetahui Lebih Dalam Sentra Dana Berjangka (bag. 2)

Breaknews.....26

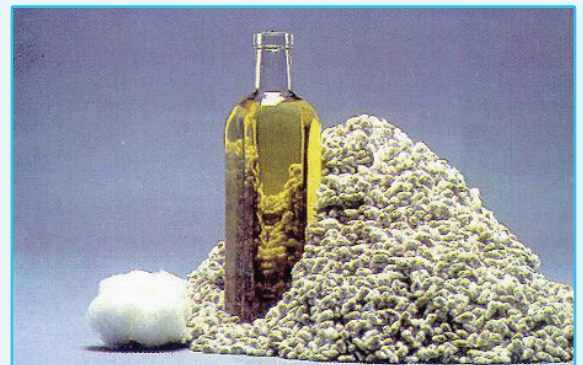
Berjangka...12-13

Kontrak Berjangka Valas
Instrumen Penting Stabilitas
Rupiah



Komoditi...20-21

Minyak Kapas
Masyhur dari "Paman Sam"



Kiprah...27

Optimis 'Diberkati'
Berkompetisi





Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dan Dirut PT POS Indonesia, I Ketut Mardjana

PT Pos Indonesia (Persero) SRG Bisnis Strategis Logistik

PT Pos memiliki komitmen kuat mengembangkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) melalui instrumen SRG dan pasar lelang komoditi. Bidang layanan jasa yang baru bagi PT Pos itu, diharapkan mendongkrak kinerja dan added value perusahaan BUMN logistik tersebut.

“
kami mulai
extend the core
business, yaitu
menumbuhkan
perusahaan
melalui produk-
produk baru dan
sistem pelayanan
baru seperti di
bidang SRG dan
pasar lelang
”

PT Pos Indonesia (Persero) dalam upaya mengembangkan bisnis logistik di tanah air, menganggap sistem resi gudang (SRG) sebagai salah satu sektor bisnis yang menjanjikan di masa mendatang. Dalam kaitan itu, PT Pos Indonesia merangkul Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku otoritas SRG. Kerjasama dua instansi itu antara lain menyangkut implementasi SRG yang seluas-luasnya, sesuai dengan potensi dari masing-masing pihak. Serta pengembangan pasar lelang komoditi yang terdapat di sejumlah daerah.

Bagi PT Pos Indonesia yang merambah bisnis SRG, kerjasama tersebut merupakan salah satu langkah mewujudkan sistem logistik nasional (Sislognas). Sebagaimana hal itu diatur melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012, tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.

“Kerjasama dengan Bappebti ini ti-

dak saja menyangkut SRG, tetapi juga pengembangan pasar lelang komoditi yang ada di berbagai daerah. Ini semua sesuai dengan rencana kerja kami periode 2013-2014. Pada periode itu, kami mulai extend the core business, yaitu menumbuhkan perusahaan melalui produk-produk baru dan sistem pelayanan baru seperti di bidang SRG dan pasar lelang,” demikian antara lain diutarakan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), I Ketut Mardjana, disela-sela penandatanganan nota kesepahaman kerjasama dengan Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, Bandung, Jabar, 29 Agustus 2012.

Di saat yang bersamaan, PT Pos Indonesia juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Merpati Nusantara Airlines, meliputi pengoperasian bersama pesawat kargo dan pengelolaan space pesawat Merpati oleh PT Pos untuk mengangkut kiriman pos maupun kiriman logistik. Di sisi lain, kerjasama yang lain juga dilakukan PT Pos Indone-

sia dengan Pemprov Jabar dalam rangka mengembangkan logistik pedesaan dan penguatan logistik domestik.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam kesempatan itu juga memberi apresiasi kepada PT Pos Indonesia yang telah berinisiatif untuk ikut berperan aktif secara langsung dalam upaya pengembangan implementasi SRG dan pasar lelang komoditi.

“Sinergi dua lembaga ini akan menguatkan sistem logistik pedesaan yang handal. Karena itu pula PT Pos menjalin kerjasama dengan Pemprov Jabar, untuk meningkatkan program ketahanan pangan pedesaan,” papar Syahrul.

Tanpa peran aktif dari berbagai pihak, tambah Syahrul, SRG dan pasar lelang komoditi tidak akan dapat dilaksanakan. “Untuk itu, keikutsertaan PT Pos dalam pengembangan SRG dan pasar lelang, memberi harapan baru akan semakin cepat dan optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan dua instrumen perdagangan tersebut,” jelas Syahrul R. Sempurnajaya.

Lewat Kajian

Head Change Management Office, PT Pos Indonesia (Persero), Amrizal, kepada **Buletin Kontrak Berjangka**, mengatakan, kerjasama yang dilakukan dengan Bappebti tersebut memiliki nilai yang cukup strategis dalam pengembangan usaha PT Pos di masa mendatang. Dalam kerangka pengembangan usaha itu, kerjasama

dengan berbagai pihak merupakan nilai tambah yang akan ditawarkan PT Pos Indonesia pada rencana initial public offering (IPO) di tahun 2013. “Kami harapkan demikian, sehingga PT Pos memiliki nilai jual yang tinggi.”

“Sesuai dengan Perpres No. 26 Tahun 2012, tentang Sislognas, itu, PT Pos memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang ada di instansi lain. Dengan Bappebti kami akan mengembangkan SRG dan pasar lelang komoditi yang telah ada di sejumlah daerah,” jelas Amrizal.

Diakui Amrizal, detail bentuk kerjasama yang akan dilakukan bersama Bappebti belum dibicarakan dengan rinci. Tetapi menurutnya, PT Pos sudah menyimpan sejumlah program yang akan dikembangkan di masa mendatang.

“Terkait dengan SRG, bukan hal baru bagi PT Pos. Kami sudah mendalami bisnis SRG ini sejak tahun 2006. Demikian juga dengan pasar lelang komoditi. Jadi, mungkin saja baru ini saatnya bagi PT Pos untuk berkontribusi. Maka itu, ide kerjasama ini datangnya dari PT Pos Indonesia dan sambut baik Bappebti,” jelas Amrizal.

Lebih jauh diutarakan Amrizal, untuk bidang usaha yang akan dikerjakan PT Pos tersebut, sudah melalui kajian



yang intens dari pihak konsultan. “Untuk rencanan ini, kami sudah direkomendasikan dari pihak konsultan ternama di luar negeri, dalam pengembangan usaha serta masuk ke bisnis SRG dan pasar lelang komoditi.”

Jasa Layanan

Bidang jasa pelayanan yang bisa dilakukan PT Pos dari sisi SRG dan pasar lelang komoditi, mencakup banyak hal. Diantaranya, PT Pos bisa berkontribusi dalam jasa pengiriman komoditi. Demikian juga dengan jasa pembayaran atau transfer dana dari transaksi komoditi. Di bidang informasi harga yang terjadi diberbagai daerah sentra produksi komoditi dan pasar le-



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya beserta jajarannya berdialog dengan Direksi Pt Pos Indonesia



lang, juga bisa dilakukan PT Pos.

“PT Pos memiliki kantor cabang sebanyak 2.800 di seluruh Indonesia. Dan, sebanyak 2.600 kantor cabang berada di wilayah pedesaan. ‘Nah, komoditi itu ‘kan adanya di wilayah pedesaan, karena itu kami bisa berperan sebagai media penyedia informasi harga dan produksi komoditi yang ada di daerah bersangkutan,” jelasnya.

Kelak di masa mendatang PT Pos juga akan mengajukan izin sebagai pengelola gudang SRG, tambah Amrizal. “PT Pos sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik tentunya tidak disangsikan lagi sebagai pengelola gudang. Karena basis usaha logistik itu dari pergudangan. Jadi, mengapa tidak juga sebagai pengelola gudang? PT Pos bisa saja mengelola gudang SRG yang di bangun pemerintah atau gudang milik swasta,” beber Amrizal.

SRG Subang

Tahap awal kontribusi PT Pos di bidang SRG direncanakan mengembangkan gudang SRG yang ada di Kab. Subang, Jabar. Oleh karenanya, PT Pos melakukan kerjasama dengan Pemprov Jabar.

“PT Pos akan menjadikan prototipe pengembangan gudang SRG yang ada di Subang. Makanya kami juga melakukan kerjasama dengan Pemprov Jabar. Di-harapkan program itu sudah bisa berjalan di tahun 2012, ini. Sehingga di tahun 2013 dan tahun-tahun selanjutnya dapat dikembangkan di wilayah lain,” jabar Amrizal.

Sedangkan di bidang pasar lelang komoditi, menurut Amrizal, PT Pos bisa menjadi media penghubung antara satu pasar lelang dengan daerah yang lainnya. Atau, PT Pos menjadi fasilitator penyelenggaraan pasar lelang yang ada diberbagai daerah.

“Jadi cukup banyak aspek yang bisa dikembangkan PT Pos di bidang SRG dan pasar lelang komoditi,” tandas Amrizal.

Salah satu kunci keberhasilan sistem logistik nasional di era perdagangan global yang dirilis pemerintah pada Maret 2012, lalu, terletak pada sistem operasi logistik yang kompetitif. Di sisi lain, sektor perdagangan yang kompetitif ditentukan pula oleh pengiriman komoditi dan jasa yang cepat dan akurat. ▲



*Dirut, PT Pos Indonesia,
I Ketut Mardjana*

Lingkup dan Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bappebti dan PT Pos Indonesia

1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perintisan kerjasama untuk:

a. Mewujudkan implementasi sistem resi gudang secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi PARA PIHAK;

b. Mewujudkan implementasi pasar lelang nasional secara lebih luas untuk komoditi tertentu dengan memanfaatkan potensi PARA PIHAK melalui jaringan informasi online dan jaringan pelayanan kantor pos.

c. Kerjasama pelatihan operasional sistem resi gudang dan pasar lelang nasional komoditi tertentu.

d. Optimalisasi pengelolaan gudang-gudang yang dibangun PIHAK KEDUA untuk meningkatkan program ketahanan pangan.

e. Bidang-bidang lain yang dianggap

perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

2) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerjasama yang lebih terperinci atas kesepakatan berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

1) Selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat melakukan tukar menukar data maupun informasi atas aset yang akan dikelola dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan awal dalam rangka persiapan kerjasama.

2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan ditindaklanjuti segera oleh PARA PIHAK dengan membentuk tim teknis untuk berkoordinasi dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna terlaksananya Nota Kesepahaman ini.



Koperasi Bakal Jadi Pengelola Gudang SRG

Koperasi sebagai lembaga ekonomi pedesaan memiliki peran strategis dalam pengembangan SRG di daerah. Pengelolaan gudang SRG di tangan koperasi, diyakini bisa meningkatkan nilai tukar petani.

Undang-undang No. 9 Tahun 2006, tentang sistem resi gudang dan undang-undang perubahannya No. 9 Tahun 2011, tidak membatasi pihak-pihak yang berminat menjadi pengelola gudang. Tetapi yang jelas, calon pengelola gudang harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan otoritas SRG, yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan maka Bappebti mengeluarkan izin pengelola gudang.

Koperasi sebagai salah satu pilar pelaku perekonomian di tanah air, layak diperhitungkan sebagai pengelola gudang SRG. Demikian antara lain diutarakan Direktur, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM, BAPPENAS, Adhi Putra Alfian, kepada **Buletin Kontrak Berjangka** dalam sebuah kesempatan baru-baru ini. “Peluang menjadi pengelola gudang juga harus diberikan kepada lembaga berbadan hukum koperasi. Karena, umumnya koperasi ada di daerah sentra produksi komoditi.”

Menurut Alfian, SRG ini adalah sebuah sistem yang bisa dikatakan sebagai katalis mempertahankan bahkan meningkatkan nilai tukar petani. Oleh

“
SRG ini adalah
sebuah sistem yang
bisa dikatakanlah
sebagai katalis
mempertahankan
bahkan
meningkatkan nilai
tukar petani.
”

karena itu, perlu ada *integrated approach* terhadap pengembangan SRG.

“Saya kira, dengan jumlah petani yang mencapai 90 juta jiwa, kemudian keragaman daerah dan lainnya, jangan sampai semangat kendor untuk memperjuangkan SRG ini berjalan optimal. Maka dari itu, harus diikuti dengan percepatan dengan tata kelola yang optimum terhadap SRG. Diantaranya, memanfaatkan lembaga koperasi sebagai pengelola gudang,” jelas Alfian.

Lebih jauh diutarakan Alfian, meli-

batkan lembaga koperasi sebagai pengelola gudang pihaknya sudah mengundang Bappebti dan Deputy Pengembangan Restrukturisasi Kelembagaan Usaha, Kemenkop UKM. “Kami fasilitasi pertemuan itu dan sudah membahasnya hingga tingkat action. Jadi yang penting kita bikin dulu *prototype*-nya, kalau sudah ada yang jalan koperasi sebagai pengelola gudang baru dikembangkan ke seluruh daerah.”

“Hingga akhir tahun 2012 ini, sudah kami canangkan setidaknya ada lima lembaga koperasi sebagai pengelola gudang,” kata Alfian.

Perpaduan

Gagasan yang dilontarkan Adhi Putra Alfian, itu, mencoba memadukan program baik dari Bappebti, Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Koperasi dan UKM.

“Dengan keterpaduan program itu, kami di BAPPENAS pun akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan kegiatan dan penganggaran dimasing-masing instansi. Kalau memang program itu bermanfaat bagi masyarakat, bisa saja kita tambah anggarannya,” tegas Alfian.

“Kami juga sudah memikirkan, dalam jangka panjangnya pembangu-



Direktur, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM, BAPPENAS, Adhi Putra Alfian

nan gudang SRG di daerah-daerah harus berdasarkan usulan koperasi yang ada di daerah bersangkutan. Sehingga jelas pelaku usahanya siapa, dan berapa besar kemampuan koperasi daerah tersebut. Dengan begitu, baik koperasi maupun petani dapat menikmati hasil yang lebih baik,” papar Adhi Putra Alfian.

Kepala Bidang Restrukturisasi Kelembagaan, Deputi VI, Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kemenkop UKM, Tri Indratny, mengatakan, langkah awal mewujudkan koperasi sebagai pengelola gudang SRG sudah dilakukan dengan menginventarisasi koperasi yang ada di daerah berdirinya gudang SRG.

“Sejak pertemuan kami dengan Bappebti yang difasilitasi BAPPENAS, kami langsung turun ke lapangan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Bappebti, kami coba mengembangkannya. Ternyata, sudah ada beberapa koperasi yang menjadi pengelola gudang SRG,” jelas Indratny.

Di sisi lain dijelaskan Indratny, sejak tahun 2008 Kemenkop UKM secara rutin menyelenggarakan sosialisasi SRG diberbagai daerah, khususnya daerah yang telah berdiri gudang SRG.

“Hal dilakukan karena program yang nyaris sama dengan SRG ada juga dikembangkan Kemenkop UKM. Dalam setiap sosialisasi, kami juga selalu mengundang narasumber baik dari lembaga keuangan daerah- Bank Pembangunan Daerah, instansi terkait termasuk Bappebti,” katanya.

Enam Koperasi

Menurut Indratny, pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama koperasi yang bisa dijadikan sebagai pengelola gudang SRG. “Hanya saja, keputusan koperasi mana yang terpilih sebagai pengelola gudang SRG tergantung kebijakan Bappebti. Karena, Bappebti memberikan izin pengelola gudang SRG kepada koperasi, juga harus memperhatikan persyaratan finansial serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Jadi, keputusannya ada di Bappebti. Kemenkop UKM hanya mengusulkan nama dari koperasi tersebut.”

Berdasarkan catatan Tri Indratny, koperasi yang sudah diverifikasi untuk dijadikan sebagai pengelola gudang ada sebanyak enam koperasi. Dan, koperasi tersebut berada di daerah gudang SRG berdiri.

“Kami tidak akan menyebut nama koperasi bersangkutan, karena kurang etis dan nanti dinilai subjektif. Tetapi berdasarkan verifikasi yang sudah kami lakukan, koperasi tersebut ada di Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo. Kab. Nganjuk, Kab. Sidrap, Kab. Indramayu, dan Kab. Subang,” jelasnya.

Ditambahkan Indratny, dokumen dari masing-masing koperasi tersebut sudah diserahkan kepada Bappebti untuk dipelajari. Kemungkinan bulan September 2012, nanti, kami akan melakukan pertemuan lagi dengan Bappebti untuk membahasnya. “Mudah-mudahan pada kesempatan tersebut sudah keluar nama koperasi yang akan menjadi pengelola gudang SRG. Sehingga program yang

digagas BAPPENAS tersebut bisa berjalan di akhir tahun 2012 ini.

Bansos Saprodi

Kemenkop UKM dalam membina dan mendukung berkembangnya koperasi di daerah, juga menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kepada koperasi yang berbasis komoditi pangan. Setiap tahun ada sebanyak enam koperasi yang diberi Bansos sebesar Rp 30 juta. Program itu sudah berjalan sejak tahun 2009, lalu. Koperasi yang ingin mendapatkan Bansos tersebut, sebelumnya mengajukan proposal kepada Kemenkop UKM, tambah Indratny.

“Jadi pada dasarnya, usulan dari BAPPENAS itu tinggal dijalankan saja. Dan kami cukup optimis hingga akhir tahun 2012 ini, sudah ada koperasi sebagai pengelola gudang SRG,” ujar Indratny.

Bila perlu, katanya, di masa mendatang nilai Bansos yang akan diberikan kepada koperasi tersebut diperbesar. Sehingga bisa meringankan biaya pengelolaan dan pemeliharaan gudang, *overhead* dan lainnya.

Di sisi lain, Tri Indratny, mengutarakan, Kemenkop UKM juga memiliki program yang mendukung koperasi pangan dalam berproduksi. Setiap tahun dialokasikan sejumlah dana yang disumbangkan kepada koperasi dalam bentuk sarana produksi (Saprodi). Sarana tersebut baik berupa bibit, pupuk, traktor bahkan mesin pengering gabah.

“Dengan program itu, nantinya kami juga akan menyalurkan kepada koperasi yang terpilih sebagai pengelola gudang SRG,” kata Indratny.

Dengan pola pembinaan koperasi semacam itu, tentunya dibutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Karenanya, ke depan kami juga akan mengusulkan tambahan anggaran kepada BAPPENAS, sambung Indratny.

Pengembangan dan implementasi SRG memang harus mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Sehingga instrumen alternatif pembiayaan pasca panen tersebut nilai tukar petani. Di sisi lain, petani terarah sebagai entrepreneur menghasilkan komoditi dengan daya saing yang tinggi. ▲

“
kami cukup optimis
hingga akhir tahun
2012 ini, sudah ada
koperasi sebagai
pengelola gudang
SRG
”



Pasar Lelang On-Line Angkat Potensi Komoditi Bali

Semester pertama tahun 2012 kontrak berjangka multilateral berjaya 53,77 %, sedangkan kontrak bilateral yang selama ini mendominasi kinerja industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) hanya tumbuh 1,83 %. Namun demikian industri PBK mengalami pertumbuhan sebesar 7,01 %.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Bali menggagas penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) berbasis *on-line* dengan target operasi pada tahun 2014. “Proyek ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembangunan infrastruktur fisiknya, seperti gudang sebagai tempat penyimpanan stok. Selanjutnya sistem perdagangan *on-line*,” jelas Kepala Disperindag Bali, Ni Wayan Kusumawathi, baru-baru ini.

Menurut Kusumawathi, pasar komoditas yang dioperasikan secara *on-line* mampu menekan biaya transaksi yang dikeluarkan dari pola perdagangan tradisional. “Pembeli tidak harus datang ke Bali untuk dapat membeli komoditas asal Bali.”

Selain itu, lanjutnya, pembeli dapat secara langsung bertemu komoditas yang diinginkan melalui situs yang akan dibangun melengkapi sistem online ini. “Metode pasar lelang melalui jaringan

“
pasar komoditas
yang dioperasikan
secara *on-line* mampu
menekan biaya
transaksi
yang dikeluarkan dari
pola perdagangan
tradisional
”

internet merupakan salah satu cara dalam memasarkan produk pertanian lokal yang bisa dikenal ke lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia ataupun dunia,” katanya.

Dengan langkah ini, Kusumawathi berharap, dapat mempertahankan dan meningkatkan neraca ekspor Bali yang terus menurun.

Mengutip data BPS Bali, nilai ekspor barang asal Bali pada Juli 2012 mencapai US\$ 48,81 juta, mengalami penurunan sebesar 1,74 % jika dibandingkan dengan Juni 2012 yang mencapai US\$ 49,68 juta. Tercatat, produk ikan dan udang mengalami penurunan sebesar 11,13 %, sedangkan kayu dan barang kayu mengalami penurunan sebesar 8,66 %. Kemudian perhiasan/permata menurun sebesar 4,52 % dan perabot rumah tangga sebesar 0,14 %.

Ekspor Bali memang terus mengalami penurunan seiring lesunya perekonomian negara tujuan ekspor tradisional, kata Kusumawathi. Untuk itu, metode *on-line* menjadi salah satu upaya revi-



Pasar Lelang

talisasi pasar lelang yang juga bermanfaat menekan turunnya angka ekspor Bali.

“Bappebti sudah memberikan izin pasar lelang on-line PLKA Bali, targetnya awal tahun 2014 sudah dapat beroperasi,” tegas Kusumawathi.

Sapi Bali

Ragam komoditi diperdagangkan PLKA Propinsi Bali yang digelar di kantor Disperindag Bali, pada 24 Agustus 2012, lalu. Total nilai transaksi penyelenggaraan PLKA Bali yang pertama di tahun 2012 itu, mencapai sebesar Rp 2,630 miliar. Ada sekitar 13 komoditi yang dipasarkan oleh produsen pasar lelang. Dari jumlah itu, ada empat komoditi yang paling diminati dalam lelang forward ini.

“Sapi potong Bali menjadi produk teratas yang paling diminati, bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan sapi lokal Bali sudah dikenal kualitasnya,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag, Bali, Ida Bagus Ardana.

Total transaksi ternak sapi Bali mencapai Rp 2,26 miliar, sedangkan volume yang dilelang sebanyak 84 ton dengan harga Rp 26.500 per kg. Kemudian menyusul komoditi tomat (Rp 225 juta), Labu Siam (Rp 90 juta), dan Cengkeh (Rp 89 juta). Namun, pelaksanaan pasar lelang ini masih belum terlihat semarak, karena hanya diikuti 8 pembeli dan 22 penjual baik dari Bali maupun luar daerah seperti Surabaya.

Meski demikian, I Wayan Ku-

sumawathi, mengatakan, Disperindag Bali selaku operator PLKA, merencanakan akan menggelar pasar lelang secara berkelanjutan, yakni rutin setiap bulan hingga akhir 2012.

“Tujuannya, untuk membentuk harga yang transparan dan memfasilitasi petani dengan pasar sehingga aksesnya tidak terbatas,” terang Kusumawathi.

Selain itu, Kusumawati, berpendangan, dengan pasar lelang stabilitas harga bisa dijaga dan petani bisa merencanakan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Instrumen ini, diharapkan memberikan keadilan pendapatan bagi petani karena selama ini produsen hulu itu dinilai mendapatkan kontribusi laba yang lebih kecil jika dibanding perantara, dan pedagang.

Menyadari lesunya pelaksanaan pasar lelang yang digelar pada 24 Agustus 2012 lalu, Disperindag Bali akan menguatkan sosialisasi pasar lelang secara langsung kepada produsen khususnya petani. “Agar mereka bisa lebih banyak ikut terlibat dalam kegiatan itu mengingat pentingnya pasar lelang,” kata Kusumawathi.

Topang Pariwisata

Lahan pertanian di Propinsi Bali dikenal cukup potensial dalam menunjang produksi berbagai komoditas hortikulturanya, baik sayuran ataupun buah-buahan. Selama ini buah lokalnya cukup berkualitas dan tidak kalah saing dengan daerah lain, termasuk dengan buah impor.

Namun potensi ini, tidak diiringi

dengan peran maksimal petani untuk memperluas akses pasarnya.

“Animo para petani di Bali untuk memasarkan produk dengan lebih maksimal memang masih sangat rendah. Itu bisa dilihat dari pelaksanaan PLKA Bali,” kata Prof. Dr. Nyoman Suparta, pemerhati sektor pertanian dari Univ. Udayana, Bali.

“Nah, kelemahan petani ini yang dimanfaatkan oleh makelar untuk membeli hasil produk petani dengan harga semurah-murahnya dan dijual kembali ke pasaran dengan harga yang jauh lebih mahal. Padahal, kata Suparta, dengan ikut dalam transaksi pasar lelang tersebut, petani bisa mendapatkan peluang agar produknya terserap lebih besar dan harga jual yang lebih pantas sehingga berpeluang menguntungkan. “Itu masih belum disadari oleh petani dan antusiasmenya rendah.”

Mengapa demikian? Suparta melihat, keengganan dan kurang pede menjadi kendala petani untuk bertransaksi di pasar lelang. Selama ini petani hanya terfokus memanfaatkan pasar tradisional untuk menjual produksinya. Mungkin karena kuantitas produksinya yang dinilai kecil, sehingga petani enggan untuk mempromosikan atau menawarkan melalui pasar lelang.

Faktor lainnya, risiko gagal serah ataupun gagal bayar mempengaruhi petani untuk bertransaksi di PLKA. “Selain itu, kemungkinan faktor lainnya yaitu petani lokal juga belum yakin dengan kualitas produknya,” jelasnya.

Suparta menilai, perilaku seperti ini sangat tidak baik dan menghambat bagi pemasaran produk lokal. Dia menyarankan, perlunya meningkatkan kesadaran petani lokal yang saat ini masih rendah. “Ini memang menjadi kendala yang harus dihadapi. Petani lebih suka untuk berkutat dengan hal yang sudah biasa dilakukan atau hanya fokus berproduksi saja, tanpa mau melihat potensi pasar yang lebih besar.”

Padahal, pangsa pasar untuk produk lokal di PLKA sangat luas. Berbagai komoditas produk hortikultura mampu memberi andil positif dalam menopang sektor kepariwisataan di Pulau Bali. “Itu merupakan potensi pasar yang sangat potensial untuk digarap,” terang Nyoman Suparta. ▲





Implementasi SRG PT Pertani Gandeng PT Tiga Pilar Sejahtera

Sekretaris Bappebti, Nizarli, saksi kerjasama
PT Pertani dan PT TPS.

Swasta berperan penting dalam percepatan implementasi SRG. Dan menjadi bukti bahwa SRG memiliki potensi bisnis yang tinggi.

PT Pertani (Persero) dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sebagai salah satu motor di Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), menandatangani nota kesepahaman- MoU pengadaan produk dan pendayagunaan aset dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPS), melalui anak usahanya yakni PT Dunia Pangan.

Dirut TPS, Stefanus Joko Mokoginta, mengatakan, kerjasama ini akan sukseskan swasembada pangan nasional, minimal memenuhi 20 % dari kebutuhan pangan di dalam negeri selama setahun, yaitu sekitar 8 juta ton. “Nantinya, dalam kerja sama tersebut meliputi penyediaan sarana produksi padi untuk budidaya, penampungan atau pemasaran hasil gabah atau beras, pelaksanaan sistem resi gudang, dan pendayagunaan sarana produksi atau aset,” kata Stefanus Joko Mokoginta, di Jakarta, pada 29 Juni 2012, lalu.

“Kerja sama ini pun nantinya akan mendukung produksi dan rencana jangka panjang TPS. Harapan kita TPS bisa menguasai market share sekitar 5 % dari total konsumsi beras nasional. Memang masalah beras ini lebih ke sosial dan industri beras itu fragmented,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perjudangan PT Pertani (Persero), Ade

Taufik, mengatakan, kerjasama dengan TPS adalah yang kesekian kalinya. Pada tahap awal, kerjasama sudah dilakukan untuk gudang berkapasitas 50.000 ton.

“Kerjasama yang dilakukan saat ini pada dasarnya ada dua hal. Yakni, kami akan meninggikan kontribusi dari branded dan investasi di rice mill yang baru. Pembangunan rice mill itu termasuk rencana kita 5 tahun ke depan,” jelas Ade Taufik.

Menurut Ade, kerjasama dengan TPS ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha beras, khususnya petani guna meningkatkan produksi dan budidaya dan menyediakan bahan baku yang standar. “Dengan kerjasama ini, 50 ribu ton gabah hasil panen bisa di tampung. Dan keuntungannya, gabah tersebut akan masuk dalam skema sistem resi gudang (SRG). Untuk 1 resi gudang saja, bisa menampung 1.000 ton -1.500 ribu ton.”

Di sisi lain, menurut Direktur Marketing TPS, Jo Tjong Seng, mengatakan, saat ini divisi beras- PT Dunia Pangan sudah bisa memproduksi 20.000 ton beras dan 35.000 ton gabah per bulan. “Jadi kebutuhan 3 bulannya beras dan gabah sekitar 165.000 ton. Sehingga untuk memenuhi target itu PTS berencana menambah konsesi lahan persawahan.

“Lahan yang sudah ditanami saat ini mencapai 79.000 hektar, dan diren-

canakan menjadi 200.000 hektar,” kata Jo Tjong Seng.

Sekretaris Bappebti, Nizarli, yang juga turut menyaksikan penandatanganan kerjasama dua pihak tersebut, mengatakan, kerjasama tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa SRG memiliki potensi bisnis yang tinggi. “Kami memberi apresiasi kepada dua perusahaan tersebut. Karena swasta pun harus berperan besar mengimplementasikan SRG ini, dalam kapasitas meningkatkan produktivitas sektor pertanian berbasis komoditi pangan.”

“Harapan kami, langkah dari Tiga Pilar itu diikuti pihak swasta lainnya. Sehingga implementasi SRG semakin membumi dan berdampak positif pada peningkatan nilai tukar petani,” jelas Nizarli.

Lebih jauh diutarakan Nizarli, pembiayaan resi gudang sudah dilakukan sejumlah perbankan. Seperti BRI, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Kalsel dan Bank Jabar-Banten. Hingga Juni 2012, nilai pembiayaan SRG sudah mencapai Rp 48 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 40 miliar.

“BPD- bank pembangunan daerah yang cukup aktif menyalurkan pembiayaan SRG selama ini. Sekitar 70 % pembiayaan SRG berasal dari BPD,” ujar Nizarli. ▲



Kontrak Berjangka Valas Instrumen Penting Stabilitas Rupiah

Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya

Kontrak valas BKDI dan term deposit valas BI merupakan alternatif instrumen yang saling terkait. Keduanya diharapkan mampu menciptakan pasar mata uang yang transparan di Tanah Air

Term deposit Bank Indonesia (BI) telah berhasil menarik mata uang asing dari luar negeri sekitar US\$ 2,36 miliar. Tujuan diluncurkannya produk BI tersebut, terkait erat dengan produk baru kontrak valas oleh Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), yakni diharapkan mampu menarik devisa hasil ekspor (DHE) yang diparkir di lembaga keuangan luar negeri.

“BKDI perlu melakukan koordinasi dengan BI untuk menciptakan pasar keuangan yang kompetitif di dalam negeri, agar menarik dan bermanfaat bagi semua pelaku pasar,” harap Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, dalam acara Buka Puasa Bersama dan Talkshow “Pendalaman Pasar Mata Uang Asing di Indonesia : Peluang dan Tantangan” yang diselenggarakan oleh BKDI, di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, 31 Juli 2012, lalu.

Menurut Syahrul, selama ini dari DHE tidak banyak masuk ke dalam negeri melainkan dikelola oleh lembaga keuangan lainnya di luar negeri. Berdasarkan data BI di tanggal 9 Juni 2012, bank-bank yang menempatkan mata

uang asingnya di luar negeri, jumlah transaksinya mencapai US\$ 4,5 miliar per hari atau sekitar Rp 42,7 triliun.

Karena itu Syahrul berharap, kontrak valas BKDI menjadi salah satu alternatif instrumen pengelolaan mata uang asing di dalam negeri, sebab pengelolaan mata uang yang baik akan menjaga devisa negara dan stabilitas nilai tukar rupiah. “Instrumen pengelolaan mata uang asing masih sangat terbatas di dalam negeri, sehingga para pelaku usaha, eksportir, importir, perbankan, mengelola valuta asing miliknya di luar negeri,” ujarnya.

Syahrul menegaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, Bappebti selalu mendorong perdagangan bursa berjangka. Dengan UU ini, katanya, di masa mendatang akan membawa perubahan yang signifikan dalam pengembangan industri berjangka dalam negeri, terutama dalam meningkatkan likuiditas perdagangan multilateral di bursa berjangka.

Tiga Faktor

Selaku penyelenggara acara, BKDI berharap ajang pertemuan ini dapat menjalin silaturahmi dan membina hubungan baik dari semua sektor yang terkait dengan perdag-

angan berjangka. Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, belum lama ini, BKDI telah meluncurkan kontrak valas yang memperdagangkan 27 pasangan mata uang asing, diantaranya AUD/JPY, AUD/NZD, EUR/AUD, USD/CAD, dan lainnya.

Untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang akan melakukan transaksi perdagangan, BKDI memiliki komitmen untuk terus melakukan proses edukasi dalam memperkenalkan produk barunya tersebut.

Sedangkan untuk memperkuat kepercayaan pasar, Megain, mengatakan, dalam perdagangan mata uang asing ada tiga hal yang akan menjadi perhatian BKDI. Yakni kredit, likuiditas, dan teknologi. Dalam hal kredit, BKDI telah memiliki lembaga penjamin transaksi valas. Yaitu PT Identrust Security International (ISI), sebagai lembaga kliring yang menjamin dan menyelesaikan tiap transaksi kontrak valas di BKDI.

“Jadi tidak perlu khawatir, karena manajemen risikonya sudah ditanggung dan dilakukan oleh lembaga kliring,” tegasnya.

Adapun dengan likuiditas, Megain, melihat, no liquidity no market. Maksudnya, likuiditas BKDI sudah terjamin,

makanya pihaknya sangat positif dan antusias untuk memasarkan produk kontrak valas. “Sedangkan terkait teknologi, dengan elektronik trading, maka BKDI akan melakukan perdagangan valas di Indonesia yang terhubung ke seluruh dunia,” jelasnya.

Tertinggal

Terkait dengan kondisi pasar keuangan di Indonesia, Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Hendar, mengatakan, Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara di sekitar kawasan Asean misalnya Malaysia, Singapura, Filipina, dan lainnya. “Pasar keuangan menjadi salah satu isu besar di Indonesia,” katanya.

Sebagai bank sentral, BI bertugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk itu, kata Hendar, dengan kondisi tertinggalnya Indonesia, menjadi tantangan bagi BI untuk memperdalam pasar uang di Indonesia. Tujuannya, untuk mencapai stabilitas sistem keuangan yang lebih kokoh. Salah satunya yaitu pasar valas yang menjadi komponen pasar keuangan.

Diakui Hendar, permasalahan pasar keuangan sangat kompleks. Harusnya, ada suatu komite nasional pendalaman pasar uang agar pasar keuangan di Indonesia dapat berkembang dengan baik. “Diperlukan suatu kebersamaan baik di otoritas maupun *capital market* agar ke depannya berjalan sesuai harapan,” un-

“
pendalaman
pasar uang sangat
diperlukan, sehingga
pergerakan nilai tukar
rupiah terhadap dolar
Amerika Serikat
menjadi terkendali
dan stabil
”

gkapnya.

Selain itu, dirinya menilai pengembangan pasar valas di Indonesia juga masih tertinggal. “Oleh karena itu pendalaman pasar uang sangat diperlukan, sehingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi terkendali dan stabil. Mudah-mudahan jika pasar uang BI dan BKDI bisa berkembang, volatilitas rupiah ke depan dapat berkurang,” katanya.

Ke depannya, tambah Hendar, BI melihat pengembangan pasar valas sangat penting di samping unsur stabilitas. Untuk itu, BI akan mereview beberapa ketentuan yang terkait dengan pasar valas, termasuk derivatif.

Derivatif Rupiah

Pemerhati pasar valuta asing, Theo F. Toemion, menilai, pasar keuangan dunia semakin berkembang dan terkadang menjadi tidak terkendali

bahkan menjadi liar. “Saya melihat terjadinya pasar versus otoritas,” ungkapnya.

Membiarkan rupiah pada pasar, kata Theo, tidak akan membuat nilai tukarnya lepas di tangan spekulasi. “Pasar tidak akan jadi liar sejauh infrastrukturnya transparan,” katanya.

Menurutnya, BI hendaknya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan cara yang tidak konservatif. Salah satunya dengan mengizinkan perdagangan derivatif rupiah dengan kontrak valas di BKDI.

Hal tersebut menurut kacamata Theo F. Toemion, dipandang lebih baik dibandingkan BI yang memfasilitasi kebutuhan valas lewat term deposit valas. Atau, intervensi pasar seperti yang selama ini dilakukan BI.

“Hendaknya BI dapat lebih pro aktif dan memberi keleluasaan, minimal dipagarin sajalah. Tidak seharusnya BI lebih cenderung mengurus pertumbuhan, pada hal tugasnya menjaga nilai tukar atau inflasi,” kritik Theo.

Theo melihat, cara konservatif yang digunakan BI sebetulnya bertentangan dengan rezim devisa bebas. “Biayanya cadangan devisa yang dikeluarkan terlalu besar ketika krisis. Kenapa tidak membiarkan suatu infrastruktur yang sudah ada,” jelasnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, sebagai salah satu narasumber dalam *talk-show* yang diselenggarakan BKDI itu. “Di satu sisi kita sebagai negara devisa bebas. Tapi sisi lain, kita kurang siap jika terjadi *external shock* yang berubah menjadi liar,” imbuh Ryan Kiryanto. ▲





Agenda Foto



Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke- 67 memberikan penghargaan kepada Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J Bintaryo dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie. Jakarta 17 Agustus 2012.



Adler Manurung, pelaku pasar keuangan Indonesia, dihadapan Eselon II dan staf Bappebti mempresentasikan peluang dan manfaat sentra dana komoditi pada industri perdagangan berjangka di Indonesia. Jakarta, 8 Agustus 2012.



Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir bersama Dirut JFX, Made Soekarwo, menjadi narasumber pada dialog perdagangan berjangka komoditi di TV Kabel BERITA SATU. Jakarta, 10 Agustus 2012



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, bersama jajaran staf Bappebti serta mantan pejabat Bappebti, bersilaturahmi dalam acara buka bersama bulan ramadhan 1433 H. Jakarta, 10 Agustus 2012.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, menyampaikan sumbangan pada anak-anak panti asuhan binaan perusahaan pialang berjangka PT Monex Futures Indonesia. Jakarta, 8 Agustus 2012



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, menjadi narasumber workshop forum komunikasi pengendali inflasi daerah yang diselenggarakan Bank Indonesia, Kemendagri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Workshop tersebut diselenggarakan Bank Indonesia Cirebon. Acara ini dibuka Walikota Cirebon, Subardi. Cirebon, 2 Agustus 2012.



Pialang Ilegal Bisa Diganjar 10 Tahun Penjara

Pialang berjangka ilegal yang menawarkan perdagangan produk-produk forex atau pun bentuk investasi bodong lainnya, bisa ditindak 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 20 miliar. Hal itu telah diatur sesuai dengan UU No. 10 tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi.

Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan, operasi pialang asing yang menarik nasabah dari dalam negeri termasuk ilegal karena tidak memiliki izin perdagangan di Indonesia dan tidak terdaftar menjadi anggota bursa atau pun di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Lebih jauh diutarakan Alfons, pemberantasan dan penanganan perusahaan pialang ilegal lokal lebih mudah diproses hukum karena semua pengurus dan pemiliknya berada di Indonesia. "Oleh karena, masyarakat kami himbau untuk memberi informasi lengkap terkait pengurus dan perusahaan bersangkutan, sehingga membantu aparat penegak hu-

kum."

"Sejumlah pelaku atau perusahaan ilegal lokal yang menawarkan perdagangan forex sudah banyak yang ditindak Kepolisian. Tetapi perusahaan ilegal yang berasal dari luar negeri sedikit lebih sulit karena mereka menawarkan produk-produk tersebut dengan cara online," jelas Alfons.

Dalam praktiknya, operasi perusahaan asing ilegal itu terstruktur dan lokasinya jika ditelusuri tidak jelas, tambahnya. Ada dari perusahaan asing itu mencantumkan alamat di luar Ibukota, tetapi ketika ditelusuri ternyata alamat palsu.

"Jadi, mereka biasanya tidak memiliki kantor di Indonesia, tetapi mengontrol perusahaannya langsung dari kantor pusat di luar negeri. Dan semua dilakukan secara on-line," katanya.

Menurut Alfons, sejumlah pialang asing yang memiliki kantor di Indonesia hanya digunakan sebagai tempat pelatihan. Atau, kantor tersebut 'dibungkus' sebagai pusat training dan edukasi in-

vestasi. "Jadi mereka tidak memiliki kantor resmi sebagai perusahaan pialang."

"Untuk meyakinkan aktivitas mereka kepada masyarakat calon investor, ada dari perusahaan asing itu menggunakan izin sebagai lembaga kursus yang diperoleh dari dinas pendidikan," terangnya.

Selain itu, kata Alfons, kantor-kantor cabang dari pialang asing ilegal ini tidak saling terkait secara managerial. Masing-masing kantor langsung bertanggung jawab ke pusatnya di luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Hongkong dan Rusia.

"Karena itu kami tekankan kepada masyarakat, untuk berhati-hati memilih perusahaan investasi. Jangan tergiur dengan keuntungan tetap- fixed income atau pun investasi dengan kontrak kecil. Yang paling utama dicermati dari perusahaan investasi tersebut legalitasnya. Kalau tidak terdaftar di Bappebti atau BKPM berarti ilegal," tandas Alfons Samosir. ▲

Lembaga Dana Jaminan Perkuat SRG

Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi (LDJGR) akan memperkuat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di sejumlah daerah. Karena LDJGR akan mengganti kerugian pemilik komoditi jika terjadi kesalahan penanganan komoditi oleh pengelola gudang. Pembentukan lembaga penjamin tersebut akan menyempurnakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG).

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, mengatakan, masih sedikit perbankan mau memberikan kredit dengan agunan komoditi yang dititipkan ke gudang. "Keengganan perbankan itu disebabkan

karena belum ada lembaga penjamin bila terjadi musibah seperti kebakaran atau banjir atau bila pengelola gudang mengalami pailit."

"Lembaga penjamin nanti dapat memberikan jaminan ke perbankan. Selama ini hanya beberapa bank pembangunan daerah atau Bank Rakyat Indonesia yang mau memberikan kredit lewat SRG," jelas Ismadjaja.

Lebih jauh diutarakannya, hingga saat ini Bappebti belum menentukan pihak mana yang nantinya berperan sebagai LDJGR. "Tetapi yang jelas, lembaga tersebut nantinya pasti independen. Sedangkan mengenai pengaturan teknisnya, kami masih menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang SRG," terang Ismadjaja Toengkagie. ▲



Asosiasi Tunggal Industri PBK Segera Terbentuk



Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gde Rakatantra

Pasca disahkannya UU No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi yang mengamanatkan terbentuknya Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (AIPB), para pelaku pasar telah melakukan serangkaian kegiatan persiapan terbentuknya asosiasi tunggal industri perdagangan berjangka Indonesia itu. Di sisi lain, telah pula dibentuk tim karateker pembentukan AIPB.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Berjangka Indonesia (APBI), I Gde Rakatantra, mengatakan, nantinya para pelaku industri perdagangan berjangka Indonesia hanya dinaungi satu asosiasi. Yakni, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (AIPB).

“Ini merupakan amanat undang-undang. Karena itu, dua asosiasi yang selama ini eksis akan dilebur menjadi satu. Maka,

APBI dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) nantinya menjadi cikal bakal berdirinya AIPB,” kata Rakatantra.

Lebih jauh diutarakannya, tim karateker berdirinya AIPB juga sudah dibentuk. “Para pelaku pasar dengan suara aklamasi menunjuk Alexancer Gee sebagai ketuanya,” katanya.

“Kami sangat mengharapkan tim tersebut bisa bekerja maksimal, sehingga AIPB segera terbentuk dan memberi rasa nyaman bagi para pelaku pasar,” jelas Rakatantra.

Menurut I Gde Rakatantra, jika AIPB terbentuk memiliki sejumlah agenda besar terhadap perkembangan industri perdagangan berjangka Indonesia. Diantaranya, meningkatkan image dan kompetisi yang sehat dari para pelaku perdagangan berjangka. ▲

JFX Siap Luncurkan Kontrak Batubara

Jakarta Futures Exchange (JFX) diharapkan dalam waktu dekat memperdagangkan kontrak berjangka komoditi batubara. Hal itu ditujukan untuk menciptakan pasar komoditi batubara yang transparan melalui mekanisme bursa berjangka. Selain itu, untuk mendongkrak kinerja JFX dalam perdagangan kontrak berjangka multilateral.

Demikian diutarakan Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, pasca pertemuan dengan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 9 Agustus 2012, lalu. Dalam pertemuan itu, juga dihadiri Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara (DBB), Kementerian ESDM, Direksi dan staf JFX, serta sejumlah pejabat perusahaan BUMN yang selama ini menggunakan batubara dalam aktivitasnya. Seperti PT PLN (Persero), PT. Pupuk Kujang (Persero) dan PT. Semen Gresik (Persero).

“Dalam pertemuan itu kami menjelaskan manfaat perdagangan berjangka ko-

moditi dan mekanisme perdagangan berjangka komoditi. Pada dasarnya kegiatan itu lebih ke arah sosialisasi perdagangan berjangka, serta menyampaikan rencana kami- JFX memperdagangkan kontrak berjangka batubara,” jelas Bihar.

Diharapkan tidak terlalu lama lagi JFX akan memperdagangkan kontrak berjangka batubara, tambahnya. “Karena sejumlah kajian pasar batubara pun sudah kami dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Secara prinsip kami sudah siap meluncurkannya, tetapi kami pun perlu ada keyakinan dari para pelaku pasar serta kebijakan yang mendukung dari Kementerian ESDM.”

“Perdagangan kontrak batubara di JFX- bursa berjangka sangat strategis. Karena posisi Indonesia sebagai salah satu produsen eksportir terbesar. Jadi, kontrak berjangka batubara sangat layak diperdagangkan melalui bursa berjangka,” katanya.

“Karena rencana itu, kami melakukan

koordinasi dengan Dirjen Minerba dan sejumlah industri pengguna komoditi batubara seperti perusahaan BUMN. Kegiatan yang sama juga sudah kami lakukan terhadap produsen batubara di dalam negeri,” ujar Bihar.

Menurut Bihar, pada 8 Agustus 2012, lalu, JFX juga melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA). “APBI ini merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam industri batubara Indonesia. Karena APBI selalu memberi pandangan terhadap para anggotanya baik tentang penyelamatan lingkungan, investasi maupun kompetisi yang sehat.”

“APBI menyambut baik rencana kami- JFX perdagangan kontrak berjangka batubara. Dan, kami pun sangat dibantu mendekatkan dengan anggotanya yang terdiri dari 109 perusahaan,” tandas Bihar Sakti Wibowo. ▲



Kopi Butuh Sertifikasi Standar Baku



Menjaga stabilitas harga kopi dunia, Kementerian Pertanian mengagagas agar semua negara produsen kopi membuat kesepakatan standar baku melalui sebuah sertifikasi khusus.

"Selama ini, konsumen yang selalu

menentukan harga sesuai dengan standar terbaik mereka. Masalahnya, standar kualitas yang diminta dapat berubah-ubah dan selalu lebih tinggi dari kualitas produksi. Sehingga harga kopi seringkali jatuh di pasar" kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian, Banun Harpini, di Jakarta.

Menurutnya, negara produsen kopi dapat menentukan harga jika semua sepakat dalam menentukan standar baku kualitas komoditi ini. Untuk itu perlu sertifikasi lembaga internasional, sehingga harga tidak lagi dikendalikan oleh perusahaan multinasional tertentu. Untuk mendorong terlaksananya gagasan ini, Banun mengakui, Kementan sedang melakukan pendekatan ke sejumlah negara, salah sa-

tunya Vietnam.

Berdasarkan data Indonesian Coffee Festival (ICF), Indonesia merupakan produsen ketiga terbesar dunia setelah Brazil dan Kolombia. Sedangkan Vietnam diperingkat keempat, namun terus membuntuti untuk naik peringkat.

Tercatat, pada tahun 2011, nilai transaksi penjualan kopi Indonesia mencapai US \$814.311.000 dengan produksi kopi nasional mencapai 633.991 ton. Adapun Luas areal perkebunan kopi Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1,29 juta ha atau 96,3 %, yakni sebesar 1.24 juta merupakan perkebunan rakyat, terdiri atas 1,04 juta kopi robusta dan 251 ribu ha kopi arabika. ▲

Prospek Cerah Jagung Sulsel

Gagal panen jagung yang melanda Amerika Serikat, rupanya membawa keberkahan bagi petani jagung di Sulawesi Selatan. Pasalnya, gagal panen yang melanda negara produsen jagung terbesar di dunia ini, memicu kenaikan harga jagung internasional.

"Gagal panen jagung di Amerika merupakan peluang bagi Sulsel. Sebab permintaan naik, otomatis harga jagung di tingkat petani juga ikut melonjak," kata Wakil Gubernur Agus Arifin Nu'mang.

Menurutnya, jagung yang dihasilkan petani Sulsel telah banyak diperdagangkan secara nasional yang diserap oleh banyak industri. "Produksi kita stabil, ditahun 2011 mencapai 1,470 jt ton, dan tahun ini diprediksi bisa mencapai 1,8 jt ton," katanya.

Untuk mendukung produktivitas komoditi jagung, kata Arifin, Pemprov Sulsel bersama pemerintah kabupaten telah menyiapkan bibit jagung yang unggul sesuai kebutuhan pasar. "Pemprov juga menjaga ketersediaan pupuk serta membangun infrastruktur pengairan dan jalan desa,"

jelasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Latunreng, prospek jagung semakin baik dan meningkat. Di Amerika dan negara maju lainnya, jagung telah dijadikan bahan bakar ethanol. "Jagung kita banyak dibeli oleh industri untuk dijadikan bahan kosmetik dan pakan ternak. Potensi harga naik sangat besar karena besarnya permintaan. Peningkatan perdagangan komoditi pertanian termasuk jagung meningkatkan serapan tenaga kerja non formal," katanya. ▲

Semester I Ekspor Kakao Anjlok 44,18 %



di Eropa dan berkurangnya permintaan dari Cina. "Permintaan CPO dari Indonesia mulai dikurangi karena pertumbuhan ekonomi Cina melambat dan tidak mencapai target," kata Ketua Bidang Pemasaran Gabungan Pengusaha Sawit, Sutanto, di Jakarta.

Menurutnya, sejak bulan Mei, volume ekspor CPO terus menurun dan GAPKI memprediksi ekspor hanya tercapai 17,58 juta ton hingga akhir tahun. Padahal di awal tahun GAPKI menargetkan volume ekspor CPO 18 juta ton.

Mengutip data GAPKI, realisasi ekspor CPO periode Januari-Juni 2012 sebesar 7,91 juta ton. Sedangkan pada semester

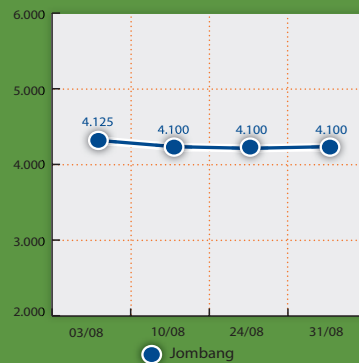
II 2012 diperkirakan ekspor CPO sebesar 9,67 juta ton. Secara bulanan ekspor CPO pada Juni 2012 sebesar 1,14 juta ton lebih rendah dibanding Mei sebesar 1,36 juta ton. "Penurunan volume ekspor ini, juga dibarengi dengan penurunan harga CPO di pasar dunia," ujarnya.

Dari analisisnya, turunnya harga karena stok CPO di Malaysia sedang melimpah sekitar 2 juta ton. Namun, tren penurunan harga CPO memang di luar perkiraan. Dengan produksi kedelai dunia yang sedang menurun akibat kekeringan di Amerika Serikat, harusnya harga CPO akan terkerek naik. ▲

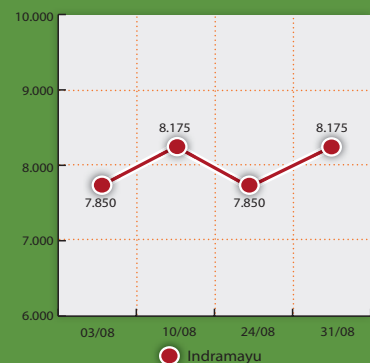


Harga Komoditi (Rp/Kg)

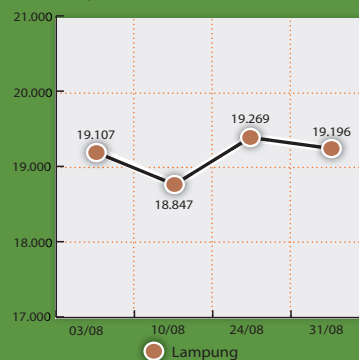
Gabah IR64



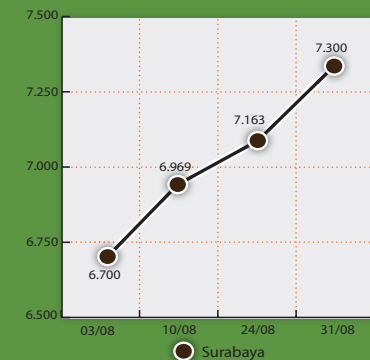
Beras IR64



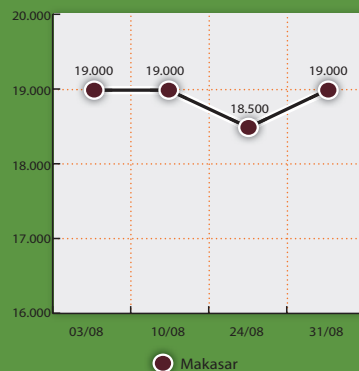
Kopi



Kedelai

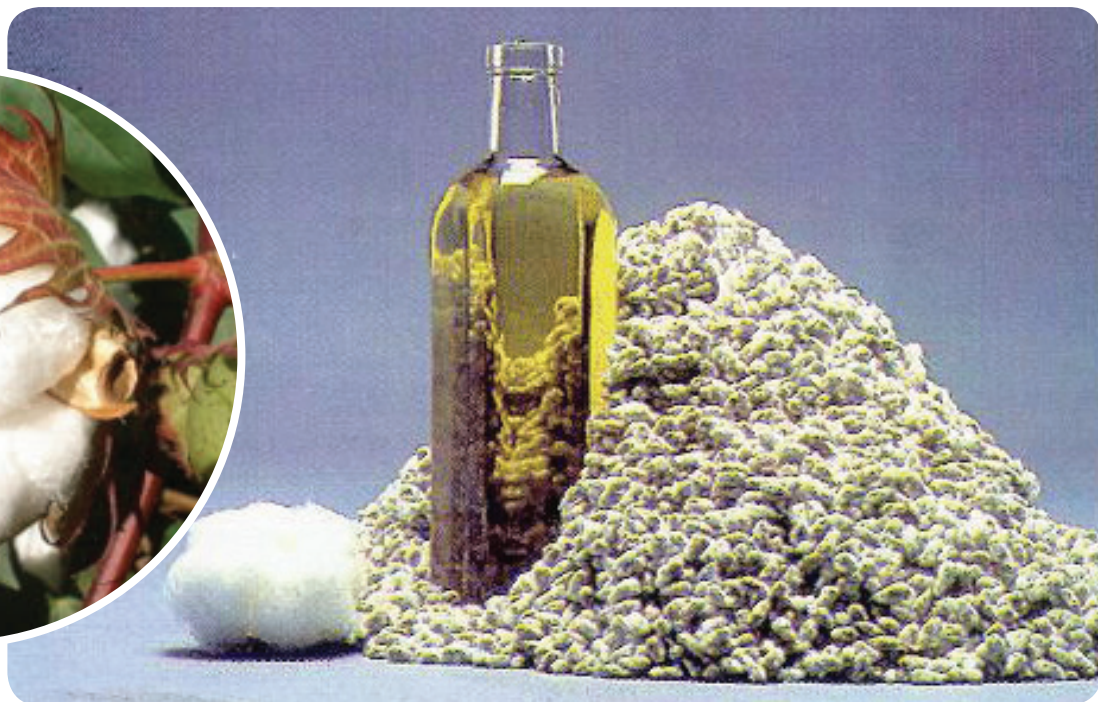


Kakao



Jagung Basah





Minyak Kapas Masyhur dari “Paman Sam”

Tumbuhan kapas lebih populer dikenal sebagai komoditi penghasil serat alam untuk bahan baku industri tekstil dan produk tekstil. Komoditi dengan bahasa latin *Gossypium* sp ini, memiliki sekitar 39 spesies dan 4 spesies yang biasa dibudidayakan, yakni *Gossypium herbaceum* L, *Gossypium arberium* L, *Gossypium hirsutum* L dan *Gossypium barbadense*. Tanaman ini tumbuh dan berkembang dengan baik pada daerah tropis dan subtropis.

Jika menilik sejarah, seperti tertulis dalam Kitab Suci Agama Hindu yaitu Rig Weda, budidaya kapas telah dilakukan di India lebih dari tiga ribu tahun lalu. Namun, para ahli arkeologi menduga, India menjadi tempat asal dari tumbuhan kapas yang telah dikenal sejak 5000 tahun lalu. Karena itu, India sudah dikenal sebagai salah satu pusat industri kapas sejak abad ke-15 SM hingga abad ke-15 M.

Adapula yang mengatakan, tanaman perdu ini sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno sebagai bahan untuk membuat pakaian. Sedangkan di Cina, kapas telah dikenal sejak abad ke-7 M, dan di Amerika, suku Aztek dan Inca telah menggunakannya sebagai bahan baku pakaian jauh sebelum bangsa Eropa menemukan benua

Amerika.

Selanjutnya di era revolusi produksi, penggunaan kapas mulai berkembang pesat saat ditemukannya mesin pemisah biji kapas. Saat ini, budidaya kapas semakin berkembang di seluruh dunia, baik di Eropa, Asia, Amerika dan Australia. Sedangkan negara-negara penghasil utama kapas diantaranya Amerika Serikat, India, dan lainnya.

Sementara itu, di Indonesia tanaman ini dibawa oleh para ahli botani Belanda pada zaman pemerintahan kolonial dan telah menyebar ke berbagai daerah. Pembudidayaanya banyak ditemukan di Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Jika selama ini kapas lebih populer dikenal sebagai bahan baku kain, ternyata biji kapas juga merupakan sumber minyak nabati. Biji kapas memiliki kandungan minyak sebanyak 16,14 % dengan kelembaban < 10 %. Minyak ini mengandung sekitar 2 % gopipol dan flavonoid, serta kandungan asam lemak tak jenuh yaitu asam linoleat (54,16 %) dan asam oleat (15,58 %). Selain itu, di dalam minyak kapas juga terdapat asam lemak jenuh, seperti palmitat, miristat, stearat, dan arakidat.

Selain dapat digunakan untuk minyak makan, hasil ekstrasi biji kapas juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pem-

buatan minyak salad, mayonnaise, salad dressing, sabun, cat, kosmetik, dan lainnya. Tak hanya itu, dari ampasnya masih dapat diolah lagi menjadi tepung biji kapas yang mengandung protein sekitar 40 %. Protein ampas kapas ini juga menjadi bahan campuran pakan ternak.

Bahan Bakar

Ekstrasi biji kapas secara tradisional telah dikenal ratusan tahun lalu dalam pengobatan alternatif oleh masyarakat India. Minyak biji kapas digunakan sebagai obat penyakit sendi rematik dan sebagai obat untuk sakit kepala.

Pada tahun 1768, Dr. William Otto, dikenal sebagai seorang yang memproduksi minyak biji kapas pertama kali untuk pengobatan di Amerika Serikat. Sedangkan pemanfaatan minyak biji kapas sebagai pengganti minyak babi, telah lebih dari satu abad lalu.

Hingga tahun 1940-an, produksi minyak biji kapas menjadi minyak nabati utama dan teratas di negeri Paman Sam ini. Selanjutnya, produksi minyak kapas menempati urutan ketiga terbanyak setelah minyak kedelai dan minyak jagung. ‘Nah, masyarakat Amerika Serikat paling doyan mengonsumsi minyak kapas dengan salad atau dijadikan minyak goreng.



Di Indonesia, sejumlah penelitian terus dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan minyak biji kapas sebagai alternatif minyak goreng. Hal ini dilakukan, untuk memberikan nilai tambah dalam agribisnis kapas di tanah air.

Paduan minyak biji kapas dan minyak bunga matahari, ternyata bisa menjadi bahan bakar mobil yang hasilnya laju kendaraan lebih kencang. Dan sudah pasti, ramah lingkungan karena berasal dari minyak nabati.

Hal ini telah dibuktikan oleh sekelompok mahasiswa Boise State University, Amerika Serikat, dengan memecahkan rekor kecepatan 250 km per jam di kelas

pick-up. Para peneliti itu menggunakan pick-up diesel Chevy S-10 buatan 1998 dan berlaga di El Mirage Dry Lake, California. Dalam teknologinya, perpaduan dua jenis minyak nabati itu harus lebih dahulu dipanaskan sampai 185 derajat untuk mencapai viskositas.

Tak berpuas diri, para mahasiswa itu pun bertekad akan kembali memecahkan rekor tercepat untuk mesin diesel, yaitu 315 km per jam di kelas pick-up. Sebelumnya juga, sekelompok peneliti lain pernah membuat catatan rekor mobil berbahan bakar minyak nabati dengan catatan kecepatan hanya 157 km per jam, tetapi dengan biaya pembuatan mobil cukup besar. ▲



Beracun Tapi Obat

Kapas memiliki biji yang mengandung protein tinggi, mineral, kalsium dan fosfor. Namun, bijinya juga mengandung senyawa gossypol yang mempunyai sifat beracun. Sehingga jika dikonsumsi manusia bisa merusak hati, jantung dan organ lain serta menurunkan fertilitas.

Oleh karena itu, biji kapas tidak dapat dikonsumsi langsung oleh makhluk hidup. Menurut riset ilmuwan Amerika keturunan India, yakni Ganesan Sunilkumar dan Keerti S. Rathore, melalui teknologi interferensi Ribonucleic Acid interference (RAI) 99 %, kandungan gossypol dapat hilang dari biji kapas dan aman untuk dikonsumsi.

Sementara itu, ahli herbal dari Departemen Farmasi FMIPA Univ. Indonesia, Dr. Abdul Mun'im MSi., Apt, memberikan, minyak biji kapas dapat dijadikan alat kontrasepsi alami bagi pria. Hal ini berdasarkan penelitian para ilmuwan di China, bahwa minyak biji kapas yang digunakan untuk minyak makan akan menyebabkan ketidaksuburan (infertilitas) pada pria. Minyak ini menyebabkan degenerasi sel yang memproduksi sperma.

Namun, menurut Abdul Mun'im, biji kapas juga memiliki manfaat sebagai tonik untuk hati dan ginjal, menguatkan tulang punggung dan lutut, menghentikan perdarahan, pereda demam, antiradang dan pelembut kulit. Biji ini juga mempunyai efek antibakteri dan antivirus. ▲

Tips Pengobatan 'Kapas'

Sakit Diare; Lima buah kapas yang masih muda dan segar dicuci dan dipotong-potong. Lalu rebus dengan satu gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, saring dan minum airnya sekaligus.

Sakit Kulit; Giling daun kapas segar sampai halus, gunakan untuk menutupi atau menurap panu, luka, luka bakar, dan memar. Bijinya yang digiling halus dapat juga digunakan untuk menurap herpes, scabies dan luka serta radang buah zakar (orkhitis).

Disfungsi Ereksi; Gongseng biji kapas sekitar 300 gram sampai kuning, sambil tambahkan arak beras 1-2 sendok teh. Gongseng pula bawang putih di tempat terpisah. Selanjutnya, giling semua bahan sampai halus. Untuk pemakaian, ambil 10 gram bubuk campuran tadi, larutkan dalam arak dan minum sewaktu perut kosong.

Berkeringat Malam; Masukkan biji kapas sebanyak 10 g ke dalam panci email bersama tiga gelas air. Lalu rebus dengan api kecil sampai airnya tersisa separuhnya. Setelah dingin, minum airnya sekaligus pada waktu perut kosong. Lakukan sekali sehari.

Permudah Persalinan; Iris akar kapas tipis-tipis, lalu seduh dan minum seperti minum teh.



Yang Terlarang Bagi Perusahaan Pialang

Pengantar Redaksi: Pada edisi Juli 2012, lalu, Redaksi di rubrik ini mengangkat hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya dan melayani para investor. Terkait itu, tentu ada juga hal-hal yang harus dihindari perusahaan pialang, misalnya, mencari calon investor dengan iklan lowongan pekerjaan atau mempekerjakan tenaga kerja asing dan berhubungan langsung dengan investor untuk tujuan transaksi berjangka. Setidaknya, dalam artikel ada sebanyak sebelas aspek yang harus dihindari perusahaan pialang. Demikian juga dengan pegawai atau karyawan perusahaan pialang, tidak diperkenankan berhubungan atau menerima amanat dari investor.

Karena ada hal yang dilarang dilakukan perusahaan pialang berjangka, maka pihak otoritas perdagangan berjangka pun telah menyiapkan sanksi dari setiap pelanggaran. Oleh karena itu, baik masyarakat dan pelaku perdagangan berjangka perlu untuk mengetahui hal apa saja yang dilarang bagi perusahaan pialang. Serta, seperti apa sanksi yang dikenakan bagi pihak yang melanggar aturan tersebut, selengkapnya di bawah ini;

LARANGAN PIALANG BERJANGKA

1. Mempekerjakan tenaga kerja asing (bukan WNI) untuk berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka transaksi Kontrak Berjangka;
2. Mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
3. Menerima Margin Awal Nasabah secara tunai;
4. Menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yg pengirimnya tidak sama dengan identitas Nasabah yg tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
5. Memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
6. Menyerahkan kode akses transaksi Nasabah kepada pihak lain selain Nasabah;
7. Menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (dealing) dan/atau sebaliknya;
8. Melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (withdrawal);



9. Memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah Pialang Berjangka ke Rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor rekening bank Nasabah sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi;
10. Menggunakan dana Nasabah untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak Berjangka;
11. Menyerahkan Laporan Transaksi Harian (daily statement) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya.

LARANGAN BAGI PEGAWAI ATAU PIHAK LAIN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DENGAN PB

1. Menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah kecuali kuasa tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti;
2. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan seperti menawarkan pendapatan tetap atau bagi hasil;
3. Membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yg diatur dalam Peraturan PBK;
4. Menerima & menggunakan kode akses transaksi Nasabah;
5. Membuat atau mempublikasikan pernyataan yg tidak benar;
6. Menerima Laporan Transaksi Harian Nasabah.

SANKSI PIDANA

SANKSI PIDANA

Tidak memiliki izin usaha, persetujuan penyalur amanat Luar negeri dan SPA	Pidana penjara paling singkat 5 th paling lama 10 th dan denda paling sedikit Rp 10 Miliar dan paling banyak Rp 20. miliar
Tidak memiliki izin Wakil Pialang, Wakil Penasihat, Wakil Pengelola Sentra Dana	Pidana penjara paling singkat 1 th paling lama 5 th dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar
Tidak menjamin kerahasiaan informasi	Pidana penjara paling singkat 1 th paling lama 4 th dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 4 miliar
Melakukan manipulasi dan menyebarkan informasi yang menyesatkan	Pidana penjara paling lama 8 th dan denda paling banyak Rp 10 miliar
Tidak menyimpan dana nasabah (margin) dalam rekening terpisah	Pidana penjara paling singkat 1 th paling lama 5 th dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar





Mengenai Lebih Dalam Sentra Dana Berjangka

*) Subagiyo (Kabag Humas dan Kerjasama Bappebti)

(Bagian Kedua)

Artikel bagian pertama penulis sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Sentra Dana Berjangka (SDB) dan bagaimana SDB ini jika diterapkan di dalam negeri, maka pada bagian kedua ini penulis ingin menggambarkan apa manfaat yang dapat diperoleh dari SDB dan hal-hal apa saja yang perlu diatur untuk mengantisipasi adanya penyimpangan penyelenggaraan SDB.

SDB memang merupakan instrumen baru dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi, walaupun dalam aturan sebelumnya sudah diatur mengenai SDB yang tertuang pada UU No.32/1997, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi. Manfaat ekonomi yang langsung dapat dirasakan masyarakat dalam berinvestasi di SDB adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru di industri perdagangan berjangka. Dengan makin meningkatnya pendapatan masyarakat dari investasi ini dan makin tumbuhnya peluang kerja di industri perdagangan berjangka, pada

gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan tumbuhnya daya beli masyarakat.

Selain itu, SDB juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan instrumen investasi yang ada saat ini, seperti perdagangan berjangka, Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar fisik komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti. Dengan hadirnya SDB, pelaku usaha akan meramaikan pasar perdagangan berjangka sebagai alternatif sarana pembentukan harga (price discovery) dan lindung nilai (hedging), peningkatan transaksi di pasar fisik dalam rangka akses pasar dan informasi harga, serta meningkatkan likuiditas transaksi SRG dalam rangka pembiayaan dan mendapatkan harga yang wajar di tingkat petani. Selanjutnya, nilai keuntungan SDB yang diinvestasikan oleh Wakil Pengelola SDB di instrumen perdagangan berjangka, SRG dan pasar fisik dan instrumen lainnya yang diatur Bappebti, akan dinikmati para peserta yang membeli sertifikat SDB.

Apa saja manfaat lain yang dapat diterima investor SDB dan bagaimana

perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat dari penyelenggaraan SDB ini?

1. Sentra Dana Berjangka dikelola secara profesional oleh orang-orang yang profesional di bidang investasi yang menamakan dirinya sebagai Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka (WPS-DB). Tentunya WPSDB tidak begitu saja menyerahkan dana-dana milik nasabah yang dikelolanya ke dalam instrumen investasi yang memiliki risiko kerugian sangat tinggi. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam Sentra Dana Berjangka ada keuntungan dan kerugian, akan tetapi keuntungan dan kerugian relatif lebih kecil dan lebih aman dibandingkan bertransaksi sendiri.

2. Dalam Sentra Dana Berjangka, dimungkinkan investor yang memiliki dana terbatas atau memiliki kemampuan pengetahuan yang terbatas dalam instrumen investasi PBK akan tetapi yang bersangkutan sangat berminat untuk berinvestasi, maka keinginannya itu dapat disalurkan melalui Sentra Dana Berjangka. karena WPSDB haruslah orang-orang profesional sebagai pengelola dana investor. Selain itu,



WPSDB harus bertanggungjawab terhadap dana-dana penyertaan yang dikelolanya sehingga apabila bersangkutan salah dalam pengelolaan dana investasi pesertanya maka Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena tindakannya dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sentra Dana Berjangka juga dapat memberikan solusi bagi investor yang memiliki waktu terbatas karena kesibukannya, investor dapat menyalurkan investasinya melalui Sentra Dana Berjangka.

4. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang berwujud portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Sentra Dana Berjangka yang diinvestasikan pada berbagai jenis instrumen investasi yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan Bappebti, sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang menransaksikan sendiri.

5. Transparansi informasi, artinya Sentra Dana Berjangka wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

6. Likuiditas investasi harus tinggi, agar investasi yang dilakukan berhasil, maka setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Sentra Dana Berjangka sehingga memudahkan

investor mengelola kasnya. Sentra Dana Berjangka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

7. Biaya Rendah, karena Sentra Dana Berjangka merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi.

Tentunya masih banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat apabila berinvestasi melalui Sentra Dana Berjangka, namun yang terpenting adalah bagaimana pengelola Sentra Dana Berjangka memiliki kemampuan dalam mengelola investasi para pesertanya sehingga dicegah sedini mungkin adanya kesalahan dalam hal pengelolaan dana peserta.

Selain itu, WPSDB harus orang-orang profesional yang memiliki kemampuan teknis di bidang investasi keuangan dan memiliki mental yang baik dalam mengelola dana masyarakat. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi SDB dapat terselenggara dengan baik setiap saat. Dan, pada gilirannya instrumen investasi di dalam negeri dapat tumbuh lebih baik lagi di masa mendatang.

Dalam kaitan itu, beberapa peraturan teknis yang perlu diatur Bappebti guna mendukung penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka dan melindungi masyarakat, antara lain; peraturan mengenai Sentra Dana Berjangka itu sendiri, peraturan mengenai kontrak sentra dana berjangka yang akan diperdagangkan, peraturan perizinan, ujian profesi wakil pengelola sentra berjangka, peraturan mengenai iklan Sentra Dana Berjangka, pelaporan keuangan bagi PSDB, dan peraturan teknis lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka dengan tujuan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dalam investasi di Sentra Dana Berjangka. ▲ (habis)

“

SDB juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan instrumen investasi yang ada saat ini, seperti perdagangan berjangka, Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar fisik komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti

”



The Multilateral contract performance is increasing 53.77 %

Indonesian commodity futures trading industry on 2012 first semester in general indicated positive performance.

This was shown by multilateral futures contract performance that was increased 53.77% compared with the same period in 2011. Last 2011 first semester, the industrial performance reached 370.891 lot, while in 2012 became 570.311 lot.

Meanwhile, bilateral futures contract that has been dominating futures trading industry performance only grow for 1.83%. The underdevelopment of bilateral contract performance was suspected as an impact from the weakening of global futures trading market because of the economic crisis that hit some areas.

On the other aspect, the increase of domestic illegal investment practice was also impacted the situation. So that all illegal investment practices have absorbed futures trading industry's market share.

Those are some aspects that were explored on consinering of transaction supervision that was held by Coftra Trading bureau on 10th of July 2012. This event was attended by Coftra's chief of law bureau, Alfons Samoris, Coftra's service and physical market bureau, Ismadjaja Toengkagie, and transaction supervision Head division of Coftra trading bureau, Widyastuti, along with some representatives of futures broker company.

"From the evaluation of business people performance on 2012 first semester, indicated the significant increase towards primary commodity futures contract 53.77 % compared in 2011. The increase of that multilateral contract transaction volume was triggered by the growth of futures contact subject that was offered by futures exchange," widyastuti explained. ▲



JFX has reached retail market

Gold futures contract has become one of JFX major product beside the cocoa contract and olein contract. Previously JFX had have 1 kG gold contract (GOL), 250 gram gold contract (GOL 250), gold scroll contract (IDR and USD), gold index contract (KIE), USD scroll contract (GU1H10) and USD gold mini scroll contract (GU1TF).

Considering the increase of market demand, JFX is starting to consider gold investment retail market with multilateral transaction that so far is never been processed. Therefore, JFX added new list of 100 gram gold futures contract (GOL 100) that was expected can draw investor attention to have gold futures contract transaction.

"With the smaller contract variance, it is expected to open wider chance for people for investing. In the

future, there is a possibility that the variance is getting smaller for example 50 gram variance," JFX director, Bihar Sakti Wibowo explained on 100 Gram gold futures contract and Ftradings Mobile launching, in JFX Jakarta, on 3rd of July 2012.

To support and make it easy for people to have multilateral contract transaction, on the same occasion JFX has also launch new trading facility that was called Ftradings Mobile. On this application, transaction can be done online with no limitation on place and time which is using mobile gadget such us smart phone, iPad and notebook.

"This application is easy to operate and user Friendly with features that support the customer to transact. With this application, customer is offered by daily statement, transaction history, order history, chart, temporary statement etc" Bihar Sakti Wibowo explained. ▲



Coftra is ready to configure Carbon Trade

In the near future Indonesia will do Carbon emission trading on Futures Exchange. This is because Indonesia is one of world biggest producer country in carbon emission based on the forest range that Indonesia has. To configure this carbon emission trading on Indonesian Futures Exchange, some related bureaus and departemens had met and discussed about the topic.

Chief of Coftra Law Bureau, Alfons Samosir, said, on 9 – 10 of July 2012 in Bogor, Coftra attended a meeting that was held by "Yayasan Bina Usaha Lingkungan", national Climate change committee and world bank. On that meeting some suggestions have been established on partnership for market readiness, in

relation with the effort to trade the carbon trading certificate.

"Futures Exchange will be a media to buy and sell carbon trading certificate. Therefore Coftra currently is in discussion on carbon emission trading with futures exchange and clearing bureau. The point that was discussed was in relation with the infrastructure to include Carbon Trade as Underlying Commodity," Alfons described.

"One of broker company, an exchange member, has came to Coftra to hand a proposal to get the licence for carbon emission trading. As this is still on discussion stage with many departments, we only accomodate the market suggestion," Alfons Samosir said. ▲



Elman Liong

PT Jireh Trillions Berjangka Optimis 'Diberkati' Berkompetisi

Di tengah persaingan ketat industri perdagangan berjangka Indonesia, tidak banyak dari pelaku usaha yang mendirikan perusahaan pialang berjangka baru. Kalau pun ada, pelaku usaha itu lebih memilih take over. Lalu, meminta izin dari otoritas untuk berganti nama dan perubahan pengurusan.

PT Jireh Trillions Berjangka (JTB), adalah satu diantara pelaku usaha perdagangan berjangka Indonesia yang mencoba menerjang arus kompetisi diindustri ini. JTB resmi menerima izin usaha perusahaan pialang berjangka dari Bappebti per Juli 2012. Dan, memilih berlabuh di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

"PT Jireh Trillions Berjangka berdiri atas gagasan sebanyak lima orang yang mempunyai visi dan misi sama terhadap industri perdagangan berjangka Indonesia. Izin usaha PT Jireh Trillions Berjangka memang benar-benar baru. Tetapi dari para pendirinya, sudah cukup makan asam-garam diindustri ini," begitu antara lain diutarakan Direktur Marketing, PT Jireh Trillions Berjangka, Elman Liong.

"Saya termasuk salah satu pendiri dari perusahaan ini. Saya sendiri sudah berkecimpung diindustri perdagangan berjangka sejak tahun 2005, di salah satu perusahaan pialang berjangka 'papan atas' saat itu," akunya Elman.

Menurut Elman, anak Medan, kelahiran tahun 1980, ini, filosofi berdirinya perusahaan pialang yang bermarks di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, itu, diambil dari bahasa Ibrani. "Jireh bisa diartikan 'yang

diberkati'. Jadi, kita memasuki industri ini dengan harapan, semua usaha kita diberkati baik dari pengurus perusahaan maupun para investor," katanya optimis.

Lalu, mengapa memilih menjadi anggota BKDI? Alumni Univ. Katholik Parahyangan, Bandung, 2002, ini, dengan tangkas mengatakan, terjun di bisnis ini tidak ada sekat yang membatasi para pelaku usaha harus terikat hanya pada satu bursa berjangka. Undang-undang perdagangan berjangka menjamin semua pelaku usaha untuk berkompetisi di semua bursa berjangka.

"Memang saat ini kami terdaftar menjadi anggota BKDI. Tetapi, kelak kami pun bisa bertransaksi di Jakarta Futures Exchange, bahkan ke bursa berjangka luar negeri,"ujarnya.

Ditambahkan Elman, saat ini kami pun sedang pengurusan menjadi anggota kliring PT Identrust Security International (ISI). Hal itu agar memudahkan baik JTB maupun para investor dalam proses transaksi di bursa berjangka.

Suami dari Kristin Winata, ini, mengakui, ceruk pasar perdagangan berjangka di dalam negeri saat ini masih sangat menjanjikan. Dan, Kota Jakarta jadi epicentrum dari industri ini. "Tetapi dari berbagai daerah juga ada kebutuhan terutama untuk kontrak berjangka komoditi."

"Nantinya kami fokus pada transaksi kontrak berjangka produk-produk emas BKDI. Pasarnya masih cukup terbuka luas, dan yang kami sasar dimulai dari para pelaku usaha pengrajin emas perhiasan," ungkap ayah satu anak ini, Jason Wilmar Liong.

"Sejak kami menerima izin usaha

pialang dari Bappebti, secara prinsip kami sudah bisa melakukan transaksi di bursa. Tetapi energi yang ada saat ini masih dikonsentrasikan pada edukasi dan sosialisasi, sembari pengurusan menjadi anggota ISI," jelas Elman.

Bicara soal program jangka pendek JTB, Elman, mengutarakan, edukasi dan sosialisasi perdagangan berjangka merupakan hal yang crucial. "Sangat tidak mungkin industri ini akan berkembang tanpa edukasi. Oleh karena itu, kami akan mengutamakan aspek edukasi dan sosialisasi. Dan kami pun, sudah mengalokasikan anggaran khusus. Sejumlah dana yang dianggarkan untuk edukasi dan sosialisasi itu kami anggap sebagai investasi jangka panjang."

"Segementasi terbesar industri ini diisi usia muda. Oleh karena itu, porsi utama edukasi dan sosialisasi diarahkan pada anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah. Selain mereka diberi pengetahuan, kelak mereka bisa melihat masa depan industri ini baik sebagai karyawan atau pun bisnis perdagangan berjangka," terang Elman.

Sebagai perusahaan baru menginjakan kaki diindustri perdagangan berjangka komoditi Indonesia, Elman dan pendiri JTB lainnya, agaknya sudah cukup mantap dengan perhitungan yang matang untuk berkompetisi.

"Segala aspek sudah kami perhitungkan memasuki industri ini. Termasuk risiko yang bakal dihadapi. Dan, kami cukup optimis bisa bertahan lima sampai sepuluh tahun mendatang, hingga kami berada di papan atas perusahaan pialang berjangka Indonesia," tandas Elman Liong. ▲



SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI
1 Syawal 1433 H

Mohon Maaf
Lahir dan Batin